



50

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
DENGAN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT "IBNU SINA" YW-UMI MAKASSAR**

Nomor : 5718/UN4.6/PM.05/2016

Nomor : HK.05.01/I/5422/2016

Nomor : 010/J/RS-IBSI/YW-UMI/VI/2016

Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan Juni tahun 2016 kami bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No. 10257/UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. dr. Khalid Saleh Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS** : Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Menkes RI No KP.03.01/438/2015 bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MPH** : Direktur RS Ibnu Sina YW UMI Makassar yang berdasarkan SK Yayasan Wakaf Umi Nomor 724/YW-UMI/A/VIII/2015 untuk dan atas nama RS Ibnu Sina YW UMI Makassar yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak ketiga secara sepakat dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak . Bahwa berdasarkan Piagam kerja sama Nomor : 5717/UN4.6/PM.05/2016 Nomor : HK.05.01/I/5421/2016 Nomor : 009/J/RS.IBSI/YW-UMI/VI/2016 Tertanggal 1 Juni 2016 maka para pihak telah menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr Wahidin sudirohusodo dan RS Ibnu Sina YW UMI Makassar dalam Piagam Kerja Sama yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut diatur dan dirumuskan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- 1) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK-UNHAS) adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin di Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik FK-UNHAS.

- 2) RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo (RSWS) adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik pemerintah berkedudukan di Makassar yang merupakan Rumah Sakit Vertikal Kementrian Kesehatan, mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi semua Strata di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu keperawatan dan Non Medik.
- 3) Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI Makassar (RS IBSI) adalah jejaring Rumah Sakit Pendidikan FK UMI milik Yayasan Wakafb UMI yang berkedudukan di Jalan Urip Sumohardjo Km 5 no. 264 Makassar mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan sebagai jejaring rumah sakit pendidikan bagi semua strata dibidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan non medik.
- 4) Dekan FK-UNHAS adalah Pimpinan FK-UNHAS yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan keperawatan di lingkungan FK-UNHAS dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin
- 5) Durektur Utama RSWS adalah jabatan struktural tertinggi di RSWS yang Bertanggung Jawab atas pengelolah rumah sakit yang dipimpinnya.
- 6) Direktur RS IBSI adalah jabatan struktural tertinggi di RS IBSI yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
- 7) Wakil Dekan FK-UNHAS adalah unsur pimpinan FK-UNHAS yang membantu dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS
- 8) Direksi RSWS adalah unsur pimpinan yang membantu direktur utama dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
- 9) Direksi RS. Ibnu Sina adalah unsur pimpinan yang membantu direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada direktur RS. Ibnu Sina
- 10) Komite Medik adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.
- 11) Ketua Departemen Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas atas pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- 12) Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspecialis yang bekerja di instalasi/SMF pelayanan dalam jabatan fungsional. Tugasnya melaksanakan diagnosis, pengobatan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- 13) Kelompok SMF dipimpin oleh seorang Ketua SMF yang dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.
- 14) Instalasi adalah unit playanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan medis dan non medis serta penelitian di rumah sakit, yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSWS/Direktur RS IBSI
- 15) Dosen pembimbing klink adalah tenaga pengajar yang bertugas mendidik dan mengajar serta diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- 16) Dosen pembimbing klinik adalah dokter organik kementrian kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa / tenaga pendidik yang di tetapkan oleh Dekan FK-UMHAS atas persetujuan direktur Para Pihak.
- 17) Mahasiswa FK-UNHAS yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis, Program studi Pendidikan dokter, program Studi S1 Fisioterapi dan program Studi Ners adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada FK-UNHAS untuk semua strata.

BAB II
DASAR TUJUAN DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama antara FK-UNHAS, RSWS dan RS IBSI dibuat atas dasar RSWS sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RS IBSI sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Bab, Pasal, dan Ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 3
Tujuan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4
Kedudukan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang ditertibkan baik oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA secara terpisah atau bersama yang menyangkut ruang lingkup kerja sama.
2. Adapun keputusan-keputusan di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

BAB III
BENTUK DAN MATERI KERJA SAMA

Bagian Pertama
Organisasi dan Tata kerja

Pasal 5 Organisasi

1. FK-UNHAS adalah unit organisasi di bawah Universitas Hasanuddin yang di pimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Dekan.
2. RSWS adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur Utama.
3. RS Ibnu Sina adalah unit organisasi di bawah yayasan Wakaf UMI yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Wakaf UMI dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.
4. Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara FK-UNHAS, RSWS dan RS IBSI dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
5. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi FK-UNHAS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.

6. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSWS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Kementerian Kesehatan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RS IBSI serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Ketua yayasan Wakaf UMI.

Pasal 6

Tata Kerja

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pelayanan yang berada pada departemen, Kelompok SMF dan instalasi/unit yang terkait.
2. Ketua Departemen / Ketua Kelompok SMF dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur Utama RSWS/Direktur IBSI.
3. Ketua kelompok SMF RSWS diangkat oleh Direktur Utama RSWS sebagai ex-officio Ketua Departemen FK UNHAS, dengan masa kerja 3 tahun.
4. Ketua Kelompok SMF pada RS Jejaring Pendidikan ditentukan oleh Direktur RS IBSI.
5. Ketua Komite Medik RSWS ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS dengan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak dengan masa kerja 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
6. Jumlah dan jenis kelompok SMF yang bekerja dalam lingkungan Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS/Direktur RS IBSI dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan.
- 7.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dekan FK-UNHAS, Direktur Utama RSWS Dan Direktur RS IBSI

Pasal 7

Pembagian Tugas

1. Tugas Utama PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata dan membantu menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tugas Utama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah melaksanakan fungsi utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan koordinasi dalam menyediakan prasarana, sarana dan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan klinis mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS dan penelitian Kedokteran dan kesehatan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pasal 8

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Yayasan Wakaf UMI dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS, menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan RSWS, serta semua kegiatan dan tindakan di RSWS yang menyangkut pelayanan kesehatan.

3. PIHAK KETIGA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan Wakaf UMI serta bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Wewenang

1. PIHAK PERTAMA berwenang mengatur Dosen FK-UNHAS dalam tugas pendidikan peserta didik FK-UNHAS pada berbagai strata sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan FK-UNHAS.
2. PIHAK KEDUA berwenang mengatur para tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RSWS.
3. PIHAK KETIGA berwenang mengatur para tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RS IBNU SINA.
4. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan klinik peserta didik yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh RS Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan.
5. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang mengadakan kerjasama dengan FK-UNHAS dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di rumah sakit dan berwenang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan pembiayaan sesuai ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran komite medis.

Bagian Ketiga Tenaga, Sarana, dan Prasarana

Pasal 10 Tenaga

1. Tenaga PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA ditugaskan bekerja untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Utama atau RS Jejaring Pendidikan atas persetujuan bersama PARA PIHAK.
2. Tenaga PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA ditugaskan bekerja untuk keperluan FK-UNHAS atas Persetujuan PARA PIHAK.
3. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK PERTAMA yang tugaskan di RSWS akan ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS dan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Dekan FK-UNHAS.
4. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK KEDUA yang ditugaskan di FK-UNHAS yang akan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Direktur Utama RSWS.
5. Kebijakan tentang kebutuhan tenaga direncanakan bersama antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing dan didasarkan atas kemampuan dan kepentingan PARA PIHAK.
6. Bagi tenaga PARA PIHAK yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan spesialisasi di bidang klinik atas biaya PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan penempatan di RSWS/RS IBSI, maka tugas mereka secara administratif sepenuhnya dibawah Direktur Utama RSWS/RS IBSI dalam kurun waktu sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 11 Prasarana, Sarana dan Bahan

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam Piagam Kerjasama ini meliputi gedung/bangunan beserta kelengkapannya dilingkungan RSWS dan RS IBSI baik yang didirikan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas/fungsi RSWS/RS IBSI dan FK-UNHAS dalam rangka hubungan kerja sama.
2. Yang dimaksud dengan sarana dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala alat dan kelengkapan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang

- dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas / fungsi RSWS / RS IBSI sebagai Jejaring pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka kerja sama.
3. Yang dimaksud dengan bahan dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi RSWS / RS IBSI sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dalam rangka kerja sama.
 4. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk tujuan pendidikan calon dokter, profesi Ners dan dokter spesialis serta untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.
 5. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di RSWS/RS Ibnu Sina terdaftar sebagai milik PIHAK PERTAMA, tetapi pemeliharannya diatur atas kesepakatan PARA PIHAK.
 6. Pengadaan bahan yang digunakan dalam pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, pengadaan bahan yang digunakan sehubungan dengan pelayanan di RSWS / RS Ibnu Sina menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dan bahan yang dipakai dalam penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti atau kelompok peneliti.
 7. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSWS / RS Ibnu Sina dengan tetap memegang teguh Kode Etik Kedokteran Indonesia dan etika Rumah Sakit Indonesia.

Pasal 12

Inventarisasi dan Pemeliharaan

1. Prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini bisa berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.
2. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan dicatat sebagai inventaris PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
3. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK PERTAMA disetujui oleh PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dicatat sebagai inventaris PIHAK PERTAMA.
4. Prasarana, sarana dan bahan dalam lingkup kerjasama yang berasal dari mitra kerja yang belum diserahkan ke PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dan atau ke PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu disetujui oleh PARA PIHAK untuk menjadi inventaris PIHAK PERTAMA atau inventaris PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
5. Pemeliharaan prasarana, sarana yang digunakan dalam lingkup kerjasama menjadi tanggungjawab bersama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Penggunaan dan Operasionalisasi

1. Semua prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam Lingkup Kerja Sama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan dalam lingkup kerja sama harus disetujui PARA PIHAK dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
3. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA yang digunakan untuk tugas pendidikan dalam lingkup kerjasama harus disetujui dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Bagian Keempat

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pelayanan

Pasal 14

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan peserta didik FK-UNHAS di RSWS/Rumah Sakit Pendidikan Utama/Jejaring RS Pendidikan diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA berwenang mengatur peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan di RSWS/Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan

dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada aturan yang berlaku di Institusi Pelayanan Kesehatan tersebut.

3. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan masukan PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
4. Administrasi pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan instansi induk masing-masing.
5. Pendidikan dalam rangka alih teknologi (berupa workshop dll) yang dilakukan di RSWS/RS Jejaring Pendidikan dengan mengundang nara sumber dari dalam negeri maupun luar negeri harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
6. Dosen FK-UNHAS dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan proses pendidikan, wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di RS Pendidikan Utama (RSWS).
7. Setiap dosen FK-UNHAS diamanahkan membina 2 (dua) RS Jejaring Pendidikan, salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Ibnu Sina.
8. RS Jejaring Pendidikan ditetapkan oleh dekan FK-UNHAS bersama Direktur RS Pendidikan berdasarkan masukan dari Ketua Departemen terkait.
9. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA di RSWS/Rumah Sakit Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerja sama akan diatur oleh ketentuan bersama PARA PIHAK.

Pasal 15 Penelitian

1. Semua penelitian yang dilaksanakan dan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan harus terdaftar di Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan tersebut.
2. Pengajuan penelitian seperti tercantum pada poin 1 di atas harus disertai rekomendasi / Persetujuan Etik Penelitian (Ethical Approval) yang diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS (KEPK-FKUH).
3. Peneliti harus menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan secara berkala (satu bulan atau triwulan bagi penelitian jangka waktu lebih dari 1 tahun) kepada SEMUA PIHAK.
4. Laporan kemajuan dan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian lain / pihak lain, tembusannya harus disampaikan kepada SEMUA PIHAK.
5. Bila terjadi Adverse Event atau Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) pada subyek penelitian, maka peneliti wajib melaporkan kepada SEMUA PIHAK dalam 2 x 24 jam.
6. Bila PIHAK PERTAMA (KEPK FK-UNHAS) memutuskan melakukan Review Lanjutan (Continuous Review) terhadap sebuah penelitian, maka rekomendasi yang dikeluarkan harus disampaikan kepada PIHAK KEDUA/KETIGA.
7. Data dan hasil penelitian menjadi milik bersama PARA PIHAK.

Pasal 16 Pengabdian Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama PARA PIHAK
2. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan rumah sakit pendidikan utama/RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA
3. Kegiatan untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin dari PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA
4. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin PIHAK PERTAMA yang diketahui oleh PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.

Pasal 17
Pengabdian Masyarakat

1. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama/ RS Jejaring Pendidikan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan mencakup komponen pelayanan medik, dan asuhan keperawatan.
2. Semua kegiatan di bidang pelayanan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka pendidikan klinik peserta didik FK UNHAS dalam lingkup kerja sama diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama PARA PIHAK serta tunduk pada peraturan yang berlaku di RS Pendidikan Utama /RS Jejaring Pendidikan.

Bagian Kelima

Pasal 18
Administrasi dan Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK-UNHAS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK PERTAMA .
2. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Pendidikan Utama/ RS Jejaring pendidikan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
3. Semua panggilan pendidikan dan atas nama Rumah Sakit oleh Instansi – instansi lain yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan fungsi Rumah Sakit menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
4. Pengelolaan keuangan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring pendidikan termasuk administrasinya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
5. Segala kegiatan yang dilakukan antara PARA PIHAK atau kegiatan – kegiatan PIHAK PERTAMA/RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/ RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerja sama administrasi dan penggunaannya diatur dalam persetujuan tertulis PARA PIHAK

Bagian Keenam

Pasal 19
Rujukan Pelayanan

1. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di RS Jejaring Pendidikan harus dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
2. RS Jejaring Pendidikan diharapkan memanfaatkan secara optimal peralatan yang dimiliki oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA. Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab IV

PENUTUP
Pasal 20
Ketentuan Peralihan

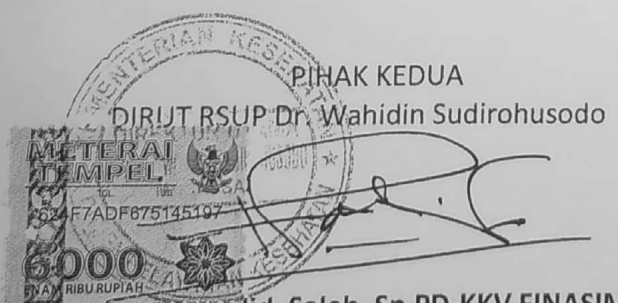
Bahwa surat perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unhas dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan Nomor : FKUH – 1616/H.48/PM.05/2013 dan nomor : HK.05.01/Dirut.IV/816/2013 yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2013 di Makassar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

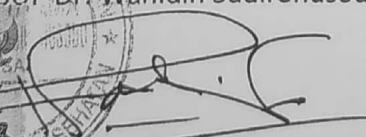
Pasal 21
Perubahan materi kerja sama, Penghentian kerja sama
dan hal-hal yang belum diatur

1. Apabila salah satu pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi piagam kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA.
2. Perubahan yang dituliskan akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
4. Apabila tidak terdapat kata sepakat atas perubahan yang diusulkan, maka kedua belah pihak sepakat tidak melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ada.
5. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi piagam kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Apabila tidak terjadi mufakat antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengajukan permasalahan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Rektor Unhas dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI
7. Keputusan bersama Sekjen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekjen Kementerian Kesehatan mengikat PARA PIHAK.
8. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku selama 2 (dua) Tahun yang dimulai tanggal 1/6/2016 s/d 1/6/2018
9. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dapat disusun dan diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 1 Juni 2016

PIHAK KEDUA
DIRJUT RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo





Dr. dr. Kholid Saleh, Sp.PD-KKV FINASIM MARS

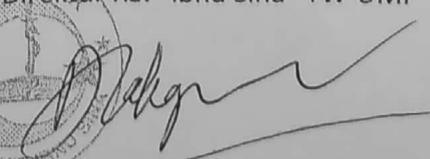
PIHAK PERTAMA
DEKAN Fakultas Kedokteran UNHAS




Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp.BS

PIHAK KETIGA
Direktur RS. "Ibnu Sina" YW-UMI




Dr. dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MPH